

IMPLEMENTASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Helnikusdita

Mahasiswa S2 Prodi MAP FKIP Universitas Bengkulu
e-mail: helni_kusdita@yahoo.co.id

Abstract: This study aims to describe the implementation of the use of school operational funds in SMA N 4 Seluma. The method used is descriptive qualitative research. Subjects were the principal, vice principal part of the infrastructure, BOS treasurer, teachers and committee. The conclusions of this research indicate that the implementation of school operational funds in SMA N 4 Seluma follow the procedures and rules that apply, the appropriate technical and operational guidelines BOS SMA.

Keywords: operational assistance

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penggunaan dana operasional sekolah di SMA N 4 Seluma. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian adalah Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Bidang Sarana Prasarana, Guru dan Komite Sekolah. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dana operasional sekolah di SMA N 4 Seluma mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku, pedoman teknis dan operasional yang sesuai BOS SMA.

Kata kunci: bantuan operasional

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Dalam Dirjen Dikdasmen Kemendikbud (2015:1) disebutkan bahwa usaha untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut dilakukan melalui program Wajib Belajar 9 Tahun. Program yang telah dimulai dari tahun 1994 tersebut berhasil dituntaskan dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP mencapai 98,2% pada tahun 2010. Konsekuensi dari keberhasilan program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP yang harus ditampung oleh SMA. Sementara itu, ketersediaan ruang kelas pada jenjang pendidikan SMA belum sesuai dengan jumlah siswa lulusan SMP. Akibatnya, banyak lulusan SMP tidak dapat melanjutkan ke SMA baik dikarenakan kendala daya tampung SMA maupun ketidakmampuan membayar biaya pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan rintisan program Wajib Belajar

12 Tahun. Salah satu tujuan program tersebut adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan SMA.

Dalam Dirjen Dikdasmen Kemendikbud (2015:1) disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah telah menyiapkan program BOS SMA. Pada Tahun 2015, telah disiapkan anggaran sebesar Rp. 5,347 triliun rupiah yang akan disalurkan kepada SMA Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Salah satu tujuan program BOS SMA ini adalah membantu sekolah untuk memenuhi biaya operasional non-personalia.

Dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan program BOS untuk SMA di seluruh Indonesia. Program BOS SMA merupakan program utama PMU yang diharapkan dapat membantu memenuhi biaya operasional sekolah dan memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi masyarakat, terutama siswa yang kurang mampu secara ekonomi.

Besaran dana BOS yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah kali satu

BOS SMA digunakan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah non personalia, yaitu buku teks pelajaran, alat tulis sekolah, pengadaan soal dan lembar jawaban, alat dan bahan habis pakai, biaya ekstrakurikuler, perbaikan ringan sarpras, langganan daya dan jasa, biaya PSB, pelaporan (bukan untuk tambahan honor guru).

Dana BOS SMA mensubsidi biaya operasional sekolah yang dipungut dari iuran siswa. Subsidi dana BOS SMA, bukan menggratiskan tapi membebaskan atau meringankan iuran sekolah dan biaya ekstrakurikuler siswa kurang mampu.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun. Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD, SMP dan SMA untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid.

Dalam ketentuannya, penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah. Khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal atau standar nasional pendidikan.

Dengan demikian, jelas bahwa untuk berjalannya operasional sekolah sangat ditentukan oleh faktor pembiayaan pendidikan, baik dalam besarnya, pengalokasian yang tepat, maupun pemanfaatan realisasi biaya yang mengarah kepada kebutuhan proses belajar mengajar, maupun untuk kemampuan pengelolaan mutu, baik mutu guru, mutu alat, mutu bahan maupun mutu siswa. semuanya berkaitan satu sama lain dalam proses belajar mengajar di sekolah dan tentunya untuk menjalankannya, sekolah membutuhkan dana atau biaya. Dalam setiap upaya pencapaian

tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan.

Besarnya iuran sekolah dan biaya ekstrakurikuler siswa yang dibebaskan/diringankan setara dengan dana BOS yang diterima oleh sekolah. Jumlah sekolah yang disebabkan/diringankan ditentukan oleh sekolah (diskresi sekolah).

Sekolah yang mempunyai siswa rata-rata mampu, dan BOS dapat digunakan untuk memenuhi biaya operasional peningkatan mutu pendidikan. Sebaliknya sekolah dengan siswa rata-rata kurang mampu, dana BOS digunakan membebaskan/meringankan seluruh siswa.

Dilihat dari tujuannya, kebijakan pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah sangatlah tepat karena Bantuan Operasional Sekolah akan dapat menyentuh masyarakat lapisan paling bawah dengan merata, di seluruh Indonesia. Sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya.

Dalam pelaksanaan di lapangan, program Bantuan Operasional Sekolah masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan. Pemerintah harus membenahi juklak dan juknis yang telah ditetapkan sehingga penggunaan Bantuan Operasional Sekolah dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan tingkat sekolah. Walaupun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sudah ditetapkan, namun sebagian penggunaan dana program yang sangat dibutuhkan oleh sekolah tetapi diluar petunjuk yang ada tidak dapat dilaksanakan.

Jumlah dana yang diberikan pada semua sekolah yang sederajat, akan sama besar karena besarnya dana akan dihitung berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki tiap sekolah.

Sekolah yang mempunyai siswa lebih banyak akan mendapat dana yang lebih besar. Sebaiknya sekolah yang jumlah siswanya sedikit maka akan mendapatkan dana yang lebih kecil. Dilihat dari segi kegiatan, antara sekolah kecil dan sekolah besar, pelaksanaan programnya dituntut sama. Seharusnya ada pengecualian bagi sekolah kecil atau siswanya sedikit. Sekolah kecil harus diberikan dana standar yang cukup untuk membiayai program-program sekolah tersebut.

SMAN 4 Seluma, adalah sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Seluma. Sekolah dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 10702679 berada di desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas. Sekolah y

dari pusat ibu kota Kabupaten. Jumlah tenaga pengajar di SMAN 4 Seluma berjumlah 34 terdiri atas 20 orang PNS dan 14 orang tenaga honorer dengan jumlah siswa di sekolah ini sebanyak 532 orang (sumber : SMAN 4 Seluma tahun 2014).

Sebagai sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Kabupaten Seluma, pada tahun 2014 jumlah penerimaan dana BOS SMAN 4 Seluma berjumlah Rp.266.000.000, pada semester satu dan Rp.310.000.000 pada semester dua dengan jumlah untuk setahunnya Rp.576.800.000 (sumber : kepala SMA N 4 Seluma). Besaran BOS yang diterima SMAN 4 Seluma ini sejalan dengan kebijakan sekolah dengan jumlah peserta didik 532 siswa x Rp500.000 per siswa = Rp266.000.000, pada semester 1 dan 518 x Rp 600.000 per siswa = Rp. 310.000.000 pada semester dua. Di lapangan dalam pengelolaan dana BOS tentunya terdapat masalah dan diberikan dana BOS yang setara dengan jumlah siswa bukan berarti bahwa permasalahan pendanaan BOS berhenti. Diduga, masalah yang baru muncul terkait dengan penyelewengan dana BOS di sekolah yang setara dengan jumlah murid ini, masih lemahnya pengawasan dan kontrol yang dilakukan juga menyebabkan dana yang diberikan dikhawatirkan tidak jadi dimanfaatkan untuk peningkatan mutu sekolah. Bahkan, tidak sedikit sekolah yang melakukan kesalahan dan penyelewengan tidak dengan sengaja, karena tidak tahu lagi dana yang akan digunakan untuk apa. Ada juga sekolah yang dengan faktor ketidaktahuan, atau ketidak sengajaan, membeli keperluan di luar ketentuan dan peruntukan dana BOS.

Orang tua muridpun menjadi bingung dengan dana ini. Mereka sering mengeluhkan, mengapa setelah adanya dana BOS, mereka kadang mesti juga diharuskan membayar biaya lainnya sekolah. Di sisi lain, sebagian orang tua murid belum merasakan adanya dampak dana BOS terhadap pembiayaan mutu sekolah.

Dari beberapa paparan yang penulis sampaikan, penulis merencanakan akan melakukan penelitian di SMA Negeri 4 Seluma yang berjudul "Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Deskriptif Kualitatif di SMAN 4 Seluma).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas rumusan masalah yang akan diamati adalah: (1) Bagaimana perencanaan implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 4 Seluma?; (2)

Bagaimana pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 4 Seluma?; (3) Bagaimana evaluasi implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 4 Seluma?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 4 Seluma; (2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 4 Seluma; (3) Untuk mendeskripsikan evaluasi implementasi Dana BOS di SMAN 4 Seluma.

Manfaat penelitian antara lain: (1) Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 4 Seluma; (2) Memberikan sumbang saran kepada Kepala Sekolah, Bendahara BOS, guru dan komite sekolah di SMAN 4 Seluma, untuk lebih meningkatkan proses pembelajaran dengan mendayagunakan dana yang ada; (3) Memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma bagaimana mencari solusi atau kebijakan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (4) Memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma bagaimana memonitor pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan data dengan trigulasi (gabungan).

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Bidang Sarana Prasarana, Guru dan Komite Sekolah.

Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hipotesisnya diterima atau ditolak tapi hanya ditekankan pada pengumpulan data untuk mendeskripsikan keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Implementasi Dana BOS

Dalam perencanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diawali dengan penyusunan Ren

Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), yang merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya selama satu tahun anggaran.

Setiap sekolah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Anggaran Belanja Operasional Sekolah (RABBOS) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah untuk satu tahun.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) merupakan rincian rencana pembiayaan dalam satu tahun anggaran seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Seluma Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS) itu berisi tentang rencana pembiayaan terdiri dari susunan program kerja, jumlah nominalnya, rincian pembelanjaan dalam satu tahun.

Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS) disusun atau dibuat oleh Kepala Sekolah, bendahara yang melibatkan dewan guru, pengurus komite sekolah dan staf tata usaha. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bendahara BOS SMA Negeri 4 Seluma sebagai berikut :

Yang menyusun Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS) adalah Kepala Sekolah dan Bendahara BOS, kemudian kepala sekolah membentuk tim yang terdiri dari guru dan pengurus komite sekolah untuk menyusun Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), kepala sekolah sebaiknya membentuk tim yang terdiri dari dewan guru dan pengurus komite sekolah. Pelibatan para guru dan komite sekolah ini akan menghasilkan rencana yang mantap secara moral semua guru, kepala sekolah dan pengurus komite sekolah merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana tersebut. Dalam penyusunan perencanaan tentunya program penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) dimasukkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).

Solusi dari berbagai macam permasalahan yang timbul dalam penyusunan RAPBS yaitu dengan mengusulkan kepada pihak terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan kabupaten seluma dan

tim manajemen BOS untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi yang intensif berkaitan dengan proses penyusunan RAPBS tersebut. Sehingga dengan adanya solusi tersebut maka, kepala sekolah dan tim yang akan menyusun RAPBS tidak akan mengalami kesulitan adapun cara dalam penyusunan RAPBS itu antara lain dengan menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan, rencana tersebut disusun berdasarkan skala prioritasnya, selanjutnya menentukan program kerja dan rinciannya serta menetapkan kebutuhan dana yang akan digunakan berdasarkan keungan yang ada.

Dari hasil wawancara kepada kepala sekolah dan bendahara BOS, dapat dijelaskan secara rinci langkah penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yaitu : (1) inventarisasi kegiatan untuk tahun yang akan datang, baik kegiatan rinci maupun kegiatan pengembangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan pada tahun sebelumnya, analisis kebutuhan pada tahun berikutnya dan masukan dari seluruh warga sekolah warga sekolah maupun komite sekolah; (2) inventarisasi sumber pembiayaan; (3) Penyusunan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) yang lengkap berdasarkan langkah 1 dan langkah 2. Kepala sekolah membuat table RKS yang terdiri dari kolom-kolom nomor urut, uraian kegiatan, sasaran kolom-kolom perincian dana dari berbagai sumber dan kolom jumlah. Tabel tersebut diisi sesuai kolom yang ada; (4) Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) kepala sekolah membuat tabel Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang terdiri dari kolom-kolom, yaitu kolom rencana penerimaan dan jumlahnya, kolom rencana dan jumlahnya, kolom rencana pengeluaran dan jumlahnya. Tabel tersebut diisi kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua komite sekolah.

Langkah-langkah penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RABBOS) itu dilakukan dengan cara menentukan kegiatan apa-apa saja yang akan dilaksanakan untuk tahun yang akan datang. Kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Diwaktu inilah kepala sekolah bersama guru dan komite sekolah menyusun prioritas penggunaan dana bantuan operasional sekolah dengan cermat.

Perencanaan dalam manajemen keuangan adalah merencanakan sumberdana untuk menunjang kegiatan pendidikan. Dalam perencanaan manajemen keuangan meliputi mulai dari penerimaan sampai pelaporan yang tersusun secara tertib. Untuk itu harus disusun anggaran dengan jalan menganalisis kebutuhan dengan data yang akurat.

Terkait dengan paparan data mengenai perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Seluma dapat disampaikan beberapa temuan sebagai berikut : 1) Perencanaan melibatkan seluruh komponen sekolah meliputi kepala sekolah selaku ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS), komite sekolah, dewan guru, serta perwakilan orang tua wali murid; 2) Sebelum merumuskan dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) diawali dengan melakukan evaluasi sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah; 3) Sekolah bersikap terbuka dalam proses perencanaan dimana sekolah bersedia menerima saran dan masukan dari komite sekolah, guru dan orang tua wali siswa; 4) Ada respon positif dan komitmen bersama dari seluruh komponen sekolah untuk memajukan sekolah melalui penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Secara umum program BOS SMA bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Sedangkan secara khusus bertujuan: 1) Membantu biaya operasional sekolah non-personalia; 2) Mengurangi angka putus sekolah SMA; 3) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA; 4) Mewujudkan keberpihakan pemerintah (*affirmative action*) bagi siswa miskin SMA dengan membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihanbiaya sekolah bagi siswa miskin; 5) Memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi siswa miskin SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu ; 6) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Dalam perencanaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pelaksanaan implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah diawali dengan penyusunan anggaran berawal dari rencana kegiatan atau program yang telah disusun dan kemudian diperhitungkan berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan

tersebut, bukan dari jumlah dana yang tersedia dan bagaimana dana tersebut dihabiskan. Penyusunan anggaran biasanya dikembangkan dalam format-format yang meliputi : (1) Sumber pendapatan; (2) Pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran, membantu siswa miskin, penyusunan dan pelaporan.

Perencanaan keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh beberapa sumber yang esensial, seperti : a) SDM yang kompeten dan mempunyai wawasan yang luas tentang dinamika sosial masyarakat ; b) Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk menunjang pembuatan keputusan; c) Menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam perencanaan; d) Tersedianya dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan. Secara umum penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Sekolah (RAPBS) di SMA Negeri 4 Seluma dilaksanakan secara procedural sesuai aturan yang berlaku. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) disusun oleh kepala sekolah dengan melibatkan bendahara, ketua dan pengurus komite, dewan guru serta orang tua murid.

Dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) perlu dilakukan sesuai dengan petunjuk dan pedoman dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditetapkan pemerintah. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena terkait dengan pertanggungjawaban sekolah nantinya.

Dengan menunjukkan beberapa dokumen diantaranya Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), dokumen laporan Bantuan operasional sekolah dari tahun 2013, menunjukkan bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), sekolah mempersiapkan mulai dari latar belakang, identitas sekolah, selanjutnya sekolah menyebutkan jenis kegiatan yang dibiayai dari penerimaan sekolah.

Dari hasil penelitian bahwa dalam perencanaan implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Sekolah (RAPBS) yang melibatkan tim penyusun Rencana Anggaran Pendapatan Sekolah (RAPBS), namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan efektif, karena kendala teknis, dari temuan ini menunjukkan bahwa tim penyusun Rencana Anggaran Pendap

(RABBS) dan Rencana Anggaran Belanja Bantuan Operasional Sekolah (RABBOS), tidak bekerja maksimal.

Dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) perlu diperhatikan asas anggaran antara lain: (1) Asas kecermatan, dimana anggaran harus diperkirakan secara cermat, baik dalam hal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sehingga dapat efektif dan terhindar dari kekeliruan dalam penghitungan. (2) Asas terinci, penyusunan anggaran dirinci secara baik sehingga dapat dilihat rencana kerja yang jelas serta dapat membantu unsure pengawasan. (3) Asas keseluruhan yaitu anggaran yang disusun mencakup semua aktivitas keuangan dari suatu organisasi secara menyeluruh dari awal tahun sampai akhir tahun anggaran. (4) Asas pembebanan mengenai dasar pembukuan terhadap pengeluaran dan penerimaan anggaran perlu diperhatikan kapan suatu anggaran pengeluaran dibebankan kepada anggaran ataupun suatu penerimaan menguntungkan anggaran perlu diperhitungkan secara baik.

Dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), kepala sekolah sebaiknya membentuk tim yang terdiri dari dewan guru dan pengurus komite sekolah, setelah itu tim dan kepala sekolah menyelesaikan tugas, merinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah selanjutnya kepala sekolah menyetujuinya.

Pelaksanaan Dana BOS

Pelaksanaan dana Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah, yang harus didaftar sebagai sala satu sumber penerimaan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Sekolah (RAPBS). Dana yang dialokasikan tersebut penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan aturan yang telah ditetapkan.

Kemudian peneliti meminta kepala sekolah untuk menunjukkan buku pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang digunakan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Peneliti diperlihatkan petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah tahun anggaran mulai tahun 2013 sampai sekarang, dan yang terbaru petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung-

jawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2015. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah memang sudah memiliki pedoman, juklak dan juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS), untuk perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana yang diterima masing-masing sekolah tidak sama besarnya karena tergantung dari jumlah siswa sekolah tersebut, di SMA Negeri 4 pada periode Juli – Desember tahun 2014 dana yang diterima berdasarkan jumlah murid $532 \text{ siswa} \times \text{Rp.}500.000/\text{siswa} = \text{Rp.}266.000.000$, sedangkan periode Januari-Juni jumlah siswa turun dari 532 menjadi 518 sehingga $518 \times \text{Rp.}600.000/\text{siswa} = \text{Rp.}310.000.000$, jumlah total dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tahun ajaran 2014/2015 = $\text{Rp.}576.800.000$. Pada awal tahun 2015 Bantuan Operasional Sekolah mengalami kenaikan $\text{Rp.}100.000/\text{siswa}$ dari tahun sebelumnya.

Pelaksanaan pencairan dana tersebut diatas dilakukan pada periode juli – desember tahun 2014 bulan September, kemudian periode januari-juni tahun 2015 pada bulan maret, adapun pelaksanaan pencairan dana dilakukan di BNI 46 Bengkulu Selatan, yang melakukan pelaksanaan pencairan itu adalah kepala sekolah dan bendahara BOS.

Semenjak adanya dana BOS sebenarnya dilarang untuk memungut iuran kepada siswa ataupun wali murid, tetapi karena kebutuhan mendesak seiring dengan jumlah murid selalu bertambah, otomatis di sekoah kekurangan meja dan kursi untuk murid sehingga hal tersebut dapat menghambat kegiatan belajar mengajar. Kebutuhan ini sangat mendesak, sedangkan pengadaan meja dan kursi tidak dianggarkan dalam RAPBS sehingga, sekolah terpaksa memungut iuran dari siswa untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Melalui rapat komite yang dihadiri kepala sekolah, bendahra BOS, dan wakil kepala sekolah, serta wali murid besarnya jumlah sumbangan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama peserta rapat tersebut.

Pelaksanaan Implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dilihat pada realisasi Rencana Anggaran Sekolah (RADBOS), pelaksanaan tersebut harus sepengetahuan komite sekolah. Komite sekolah sebagai mitra sekolah berhak dan wajib mengetahui tentang segala sumber dana dan permasalahan yang ada di

pengamatan peneliti dan hasil wawancara terlihat jelas bahwa komite dan orang tua murid mengetahui bahwa sekolah memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetapi tidak mengetahui secara rinci besarnya jumlah dana yang diperoleh dan pemanfaatannya.

Pada kenyataannya dalam pelaksanaan implementasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah, penggunaan dana tidak selalu sama dengan kebutuhan sekolah. Pelaksanaan penggunaan dana BOS mengacu pada buku pedoman dan aturan yang ada dan berlaku.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, terlihat bahwa realisasi Pemanfaatan biaya yang bersumber dari komite sekolah tidak ada permasalahan karena adanya persetujuan dari pihak komite sekolah berdasarkan hasil musyawarah antara kepala sekolah, bendahara, ketua dan pengurus komite dan wali murid.

Sementara itu RAPBS berisi tentang rencana-rencana tentang pembiayaan yang terdiri dari susunan program kerja, maupun pembangunan, rincian pembelanjaan dalam satu tahun anggaran. RAPBS disusun oleh kepala sekolah dibantu tim pelaksanaan BOS yang terdiri dari wakil kepala sekolah, bendahara BOS, guru dan komite.

RAPBS dibuat setiap awal tahun dengan melibatkan guru wakil kepala sekolah dan pengurus komite yang tentunya melalui rapat. RAPBS berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan dana BOS agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan tentunya agar tidak terjadi penyimpangan dana.

Dalam pembuatan RAPBS guru dan komite sekolah selalu dilibatkan karena, jika mereka dilibatkan mereka akan mengetahui kegunaan dana yang masuk maupun yang dikeluarkan di sekolah ini. Komite sekolah setiap pelibatangannya selalu memberikan masukan terutama dalam pelaksanaan dana yang berhubungan dengan membantu siswa miskin, sementara keuntungan terlibatnya komite sekolah dalam penyusunan RAPBS itu lebih transparan dalam penggunaan dana sehingga tidak menimbulkan fitnah jika kepala sekolah korupsi mengenai dana BOS.

Jadi, dalam hal ini komite tidak hanya memberikan tanda tangan saja pada saat pelaporan karena dari awal sampai akhir pelaksanaan komite selalu terlibat. Dalam pelaksanaan BOS sesuai dengan RAPBS sehingga pelaksanaan BOS dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan. Dana

BOS dilaksanakan begitu dana cair, meskipun pencairan dana terlambat proses kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan. Adapun hambatan dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS yaitu membuat RAPBS yang sangat sulit dan rumit. Dalam pelaksanaan penggunaan BOS tidak terlepas dari buku pedoman JUKLAK dan JUKNIS nya, serta konsultasi langsung kepada tim manajemen BOS baik di daerah maupun di pusat.

Adanya peran komite sekolah dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, selaku penanggung jawab, anggota yaitu wakil kepala sekolah, bendahara, satu orang tenaga pendidik dan komite sekolah. Di mana kepala sekolah menunjuk guru/ bendahara sekolah yang bertanggung jawab untuk mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat sekolah. Sementara komite sekolah memantau penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Komite sekolah merupakan mitra sekolah yang berkedudukan dan berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengawas dan mediator penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sebagaimana diatur dalam UU No.20 Tahun 2003 dan kepmendikns Nomor 044/U/202 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite sekolah terdiri dari unsure-unsur masyarakat seperti dewan guru, masyarakat, dan orang tua wali murid dan pembentukannya harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Pengambilan keputusan bersama antara sekolah dan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi program kerja yang dilakukan oleh sekolah.

Dalam pelaksanaannya dilapangan dilihat dari permasalahan yang muncul dilokasi penelitian berkaitan dengan pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah dan kebijakan sekolah gratis yang dilakukan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan SMA yang dilakukan oleh dinas pendidikan, terdapat dua persoalan mendasar dalam proses elementasinya kebijakannya sendiri dan lingkungan kebijakan. Dari kebijakan aspek sendiri dapat dikaji bahwa sekolah gratis tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka peluasan danpemert

Implementasi pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang dikurirkan menjadi sorotan bagi masyarakat dimana realisasi dana dilapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat dibuku petunjuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam hal ini pendekatan kebijakan adalah pendekatan dari atas yang dimaksudkan untuk merubah perilaku lingkungan kebijakan.

Kebijakan sekolah gratis memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga Negara Indonesia yang telah memasuki usia sekolah untuk memperoleh pendidikan Dasar sampai pada pendidikan SMA. Kebijakan sekolah gratis merupakan kemauan politik pemerintah yang lebih banyak bersifat politis dan menempatkan sekolah gratis menjadi fokus system pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak selalu berjalan dengan mudah. sebagai program pemerintah yang sebenarnya sangat populer keberadaannya, Program BOS harusnya mendapat berbagai respon positif, dari berbagai pihak dan dari berbagai sudut pandang. Seperti halnya program pemerintah yang lain. Ternyata program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sendiri menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan, Sejak dikurirkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA tahun 2013, banyak pihak yang salah paham terutama masyarakat yang mengira bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan beasiswa, padahal bukan, Dana Bantuan tidak diberikan secara langsung kepada siswa melainkan kepada sekolah.

Faktor internal dalam pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dihadapi oleh sekolah lebih ke proses penyusunan laporan pertanggung jawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selalu ditentukan waktu dateline laporan penyelesaiannya. Masi belum optimalnya pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pihak sekolah karena keberadaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ternyata belum sepenuhnya digunakan untuk keperluan sekolah yang utama yakni, membiayai dan memfasilitas kebutuhan siswa.

Sedangkan faktor eksternal dalam pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah masih adanya anggapan dan pemahaman dari pada orang tua wali murid bahwa program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan khusus untuk siswa miskin padahal dana Bantuan Operasional

Sekolah bukan sekedar bantuan khusus siswa miskin namun mencakup untuk biaya operasional keseluruhan bagi semua pelayanan pendidikan siswa di sekolah.

Pelaksanaan implementasi penggunaan dana yang bersumber dari dana BOS sudah sesuai dengan rencana anggaran dana BOS yang telah ditentukan. Jadi semua peruntukan dana sudah diatur sesuai dengan aturan, buku petunjuk dan buku pedoman yang telah diberikan, sekolah tinggal melaksanakannya.

Dalam implementasinya di lapangan, dana BOS sebenarnya belum mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sehingga masih diperlukan dana dari orang tua siswa/masyarakat. Sebelum diputuskan dalam rapat komite, semua pengalokasian dana sudah disusun dan dituangkan dalam RADBOS yang sudah dibahas oleh kepala sekolah, bendahara dan pengurus komite.

Pelaksanaan implementasi penggunaan dana BOS secara umum dana yang dikeluarkan oleh sekolah sudah berjalan sebagaimana mestinya, karena semua sudah diatur dan penggunaannya sudah tertuang dalam Rencana Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (RADBOS). Ada beberapa permasalahan dalam realisasi pelaksanaan penggunaan dana yaitu pelaksanaan harus disesuaikan berdasarkan petunjuk dan buku pedoman dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bukan berdasarkan kebutuhan sekolah. Padahal banyak kebutuhan sekolah lainnya diluar penggunaan berdasarkan buku petunjuk dan pedoman tersebut. Kemudian pencairan dana BOS tersebut kadang-kadang sering terlambat atau tidak tepat waktu padahal proses belajar mengajar harus terus berjalan.

Selain itu, pelaksanaan dalam penggunaan atau pembelanjaan kebutuhan sekolah sering terjadi perubahan, penambahan ataupun pengurangan antara apa yang tertera dalam RADBOS tidak selalu sama dengan kenyataan. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi penggunaan dana BOS di SMA Negeri 4 Selama pelaksanaan penggunaannya disesuaikan dengan petunjuk dan buku penggunaan dana BOS SMA.

Sedangkan dana yang berasal dari masyarakat atau yang disebut dana komite, pelaksanaan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah berdasarkan RAPBS yang telah dibuat, disepakati dan diputuskan secara musyawarah dan mufakat antara kepala sekolah, bendahara, guru, ketua dan pengurus komite, serta wali murid.

Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang cenderung mengeluarkan dana untuk kegiatan yang tidak tepat yang seharusnya menjadi kewajiban dari pengelola sekolah berupa kegiatan perayaan hari nasional, keagamaan maupun akreditasi sekolah. Faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memberikan keringanan kepada para orang tua dalam pembiayaan pendidikan sehingga mampu memberikan motivasi kepada orang tua untuk menyekolakan anaknya menempu pendidikan 12 tahun. Kendala dan strategi yang dialami dalam pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), adalah lemahnya peran komite sekolah, kepala sekolah dan tenaga pendidik dalam membuat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).

Dalam pelaksanaan implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA Negeri 4 seluma, pelaksanaannya cenderung merumuskan program kerja secara sepihak dengan mengacu pada kebutuhan pendidikan pada umumnya, belum menampung usulan kebutuhan guru guna kelancaran proses pembelajaran. Realita ini menyebabkan sebagian program kurang sesuai dengan harapan guru. Selama ini tanpaknya sebagian para guru tidak mengetahui perencanaan dan penganggaran dana yang telah ditetapkan. Demikianlah pula halnya dengan fungsi komite sekolah sebagai mitra kerja sekolah dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum menunjukkan partisipasi secara optimal. Komite sekolah hanya berperan dalam menandatangani Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah untuk memenuhi persyaratan penerimaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut keterangan guru yang peneliti wawancara dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah, walaupun dibentuknya tim dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah tetapi tidak begitu dilibatkan karena kepala sekolah merasa mampu mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna pemenuhan pendidikan di SMA Negeri 4 Seluma. Temuan ini menunjukkan bahwa kepala sekolah belum sepenuhnya melibatkan unsur terkait, baik komite sekolah, guru dan tata usaha sebagai tim pengelola dana dalam proses pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Secara konseptual sekolah menempati posisi kunci dalam penentuan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah, termasuk

kebijakan penggunaannya untuk berbagai kegiatan sekolah. Menurut ketentuan program dana Bantuan Operasional Sekolah dikelola oleh kepala sekolah dan guru dan tenaga administrasi yang ditunjuk sebagai bendahara, yang selanjutnya disebut bendahara Bantuan Operasional Sekolah. Uang dikirimkan langsung ke rekening sekolah oleh lembaga penyalur yang ditentukan oleh satuan kerja provinsi. Sekolah boleh menggunakan dana sesuai dengan juklak dan juknis program dan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Dan Rencana Anggaran Belanja Bantuan Operasional Sekolah (RABBOS), yang disusun oleh Kepala Sekolah dan tim bos.

Evaluasi Implementasi Dana BOS

Evaluasi terdiri dari beberapa aktivitas yang bertujuan agar pelaksanaan menjadi sesuai dengan rencana. Dengan demikian evaluasi itu merupakan proses yang berurutan dari pelaksanaan penggunaan dana BOS di SMA Negeri 4 Seluma.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA, intruksi evaluasi dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 51 tahun 2011 Tentang Pedoman dan Petunjuk teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang didalamnya meliputi evaluasi melalui tahapan pemantauan dan supervise pemantauan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA atau belum. Sedangkan supervisi ditujukan untuk mengetahui sampai dimanakah atau seberapa besarnya manfaat beserta cakupan dari rintisan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA, dimasa yang akan datang atau selanjutnya. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara internal oleh bagian komite sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota melalui Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Evaluasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan instansi vertikal di atasnya, serta aparat pemeriksa keuangan pemerintah. Terkait dengan adanya evaluasi dari luar sekolah, kepala sekolah menggerakkan semua unsur yang terkait agar menyediakan data yang dibutuhkan oleh pengawas yang akan mengevaluasi, dalam hal ini kepala sekolah sudah mengkoordinasikan semua kegiatan pengawasan sehin

berjalan lancar. Hal ini seperti disampaikan oleh bendahara BOS SMA Negeri 4 Seluma.

Evaluasi dari pihak yang melakukan pengawasan terhadap dana bantuan operasional sekolah di SMA Negeri 4 Seluma jelas ada. Kepala sekolah juga ikut melakukan evaluasi dan pengawasan, mengkoordinir supaya semua administrasi mengenai keuangan lengkap, sehingga apabila ada evaluasi dan pengawasan dari luar kami bisa menunjukkan data yang ada pada pihak yang akan mengevaluasi dan apabila diminta untuk menyerakan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) ke Dinas Kabupaten Seluma kami sudah siap. Disamping itu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma juga pernah datang pada sekolah ini untuk mengawasi dan mengevaluasi. Kalau tidak salah manajer Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bidang pendidikan Kabupaten Seluma pernah berkunjung ke sekolah ini untuk mengawasi dan mengevaluasi, mengaudit serta melihat perlengkapan administrasi tentang penggunaan anggaran tersebut dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan evaluasi pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan maksud untuk mengetahui : (1) Kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku; (2) Kesesuaian yang dicapai baik bidang terkait, administratif maupun teknis operasional dengan peraturan yang ditetapkan; (3) Kemanfaatan sarana yang ada (manusia, biaya, perlengkapan dan organisasi) secara efektif dan efisien; (4) Ada perubahan sistem guna mencapai hasil yang telah sempurna.

Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menjaga dan mendorong agar: (a) Pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan; (b) Pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan; (c) Kesulitan dan kelemahan bekerja dapat dicegah dan ditanggulangi atau setidaknya tidaknya dapat dikurangi; (d) Pelaksanaan tugas berjalan efisien, efektif dan tepat pada waktunya. Evaluasi keuangan memiliki fungsi untuk mengawasi perencanaan keuangan dan pelaksanaan penggunaan keuangan BOS.

Pelaksanaan BOS disekolah tidak terlepas dari evaluasi terhadap penggunaan dana tersebut, evaluasi dilakukan disekolah dan di Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma. Evaluasi tersebut dilakukan oleh pihak dari tim manajemen BOS

di Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, biasanya mereka datang ke sekolah untuk mengevaluasi atau melihat perlengkapan administrasi tentang penggunaan dana di sekolah, apakah penggunaan dana tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan kesalahan penggunaan data maka melalui evaluasi akan diadakan perbaikan, tetapi biasanya pihak yang melakukan evaluasi hanya melihat dan memeriksa laporan pertanggungjawaban yang berbentuk laporan tertulis dan soft copy.

Untuk melakukan evaluasi yang tepat, kepala sekolah dituntut untuk memahami pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana administrasi keuangan, memahami peraturan pemerintah yang mengatur penggunaan dan pertanggungjawaban serta pengadministrasian keuangan.

Hasil penelitian terhadap SMA Negeri 4 Seluma ini menunjukkan bahwa kepala sekolah beserta pihak dari dinas Pendidikan Seluma melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan Rencana Anggaran Bantua Operasional Sekolah di SMA Negeri 4 Seluma. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar segala kegiatan pelaksanaan senantiasa sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi pemantauan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat sekolah melalui komite sekolah yang merupakan evaluasi internal, pada proses evaluasi ini meliputi pemantauan dan pengawasan di tingkat komite sekolah selaku patner kerjasama dengan pihak sekolah melakukan pemantauan beserta pengawasan terhadap program-program yang dilaksanakan di tiap-tiap sekolah secara priodik dan hasilnya dicatat sebagai dokumen.

Kemudian dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada sekolah dalam proses penyusunan laporan pertengahan dan laporan akhir program atau kegiatan sekolah serta untuk bahan konsultasi ketika ada pemantauan dari instansi yang membawahi serta menaungi yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, atau direktorat Pembinaan SMA (Sekolah Menengah Atas) hal tersebut sesuai dengan pernyataan Siagian (2008:112) yang mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan efektif.

Di Tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui pengawas sekolah, pada proses evaluasi ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota disini berfungsi melaksanakan pemantauan langsung sebagai bagian tugas dan rutinitas pembinaan terhadap tiap-tiap sekolah yang melaksanakan program-programnya. Dengan demikian pemantauan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota mencakup seluruh aspek kegiatan sekolah termasuk pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Evaluasi eksternal dilakukan oleh direktorat manajemen BOS SMA, disini melakukan pemantauan kepengelola program di dinas pendidikan propinsi dalam rangka memantau pelaksanaan program BOS SMA, untuk mengetahui hasil yang sudah dicapai, dan mencatat masalah yang menjadi hambatan pelaksanaan dari program BOS. Dinas pendidikan propinsi di sini melalui peranannya berfungsi untuk melakukan pemantauan langsung terhadap sekolah berdasarkan pada sampel atau contoh dari fakta yang sudah terdata untuk kemudian memastikan akuntabilitas dari keterlaksanaan beserta ketercapaian dari program-program di SMA (Sekolah Menengah Atas) Bahwa kegiatan evaluasi tersebut harus dilakukan secara hati-hati, bertanggungjawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya (Arikkunto,2007:1), Dengan melihat proses pemantauan secara internal dan eksternal di atas tentunya proses evaluasi selalu melihat pada kontekstual struktur hearkis dimana setiap pemantauan dan pengawasan mengerucut dari berbagai tingkatan yakni dari pengawasan tingkat sekolah oleh komite sekolah kemudian dari tingkat dinas pendidikan melalui pengawas dan tim manajemen BOS.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terlihat bahwa evaluasi pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah di SMA Negeri 4 Selama dilakukan oleh tim manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Evaluasinya dilakukan dengan cara melihat laporan pertanggungjawaban, laporan tersebut berisi Rencana Anggaran Pendapatan Sekolah (RAPBS), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran dana, rincian penggunaan dana, buku kas umum dan buku kas pembantu tunai.

Evaluasi pelaksanaan program BOS disekolah bukanlah merupakan kegiatan akhir, artinya kegiatan evaluasi ini merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan atau lebih

tepat bila dikatakan siklus berkelanjutan sebab tidak berhenti sampai terkumpulnya data atau informasi, tetapi data atau informasi itu digunakan sebagai dasar kebijakan atau keputusan dalam pengebangan program BOS selanjutnya. Karena itu kegiatan evaluasi program BOS selalu memperhatikan prosedur dan langkah-langkah serta metode atau strategi yang harus digunakan.

Tahapan prosedur evaluasi, yaitu meliputi serangkaian kegiatan yang berurut sebagai berikut: a) Identifikasi tujuan yang akan dicapai, melakukan identifikasi terhadap tujuan yang ingin dicapai sangat penting karena memberikan arah pekerjaan yang akan dilaksanakan. Artinya selama melakukan evaluasi tetap mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan.

Langkah awal kegiatan evaluasi adalah menetapkan parameter tau batasan-batasan yang akan dievaluasi, dapat dipusatkan pada program BOS secara keseluruhan atau pada tujuan khusus secara terpisah-pisah, tujuan itu hendaknya jelas, singkat, operasional dan dapat diukur tingkat efektivitsnya; b) Pengembangan rencana evaluasi, pengembangan rencana evaluasi merupakan langkah lanjutan setelah menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Komponen-komponen rencana evaluasi program BOS yang perlu dikembangkan antara lain data atau informasi yang dibutuhkan, alat pengumpulan data yang digunakan atau informasi yang dapat dihubungi, personil pelaksanaan, waktu pelaksanaan, kriteria penilaian dan bagaimana pelaporan dan pada siapa laporan itu disampaikan; c) Pelaksanaan evaluasi, setelah rencana itu disusun dan disetujui, pelaksanaan evaluasi program BOS bergantung pada cara atau metode yang digunakan. Prinsip pelaksanaan evaluasi perlu memperhatikan faktor-faktor yang telah direncanakan sehingga terjadi berinteraksi antara faktor yang satu dengan lainnya dan dapat membntu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan ; d) Pelaporan dan pemanfaatan hasil evaluasi, pelaporan dan pemnfaatan hasil evaluasi dianggap sangat penting sebab langkah ini merupakan bentuk konkrit sikap akuntabilitas atas program dan hasil kegiatan yang telah dilakukan seorang konselor dan staf yang lainnya.

Hasil kegiatan evaluasi yang baik adalah yang dapat memberikan sumbangan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan keputusan selanjutnya, Program BOS itu diganti atau berlanjut atau dikembangkan semata-mata berdasarkan hasil evaluasi

pokok tolak ukur efisiensi dan indikator terdahulu.

Sesuai dengan wawancara dihasil penelitian berdasarkan penuturan kepala sekolah SMA Negeri 4 Seluma, Darmawan, MP.d, yang memaparkan pendapatnya sebagai proses evaluasi pengelolaan atau penyelenggaraan BOS kami selalu melihat dan berpandangan pada tolak ukur proses pengelolaan atau pelaksanaan BOS di tahun lalu dimana melakukan pengkajian penilaian dari setiap pengawasan berdasarkan indikator tingkatan pencapaian oleh sekolah terhadap program BOS yang sudah dilaksanakan kemudian berdasarkan penilaian kami melakukan pengukuran dengan membandingkan indeks pencapaian pelaksanaan terdahulu untuk mengetahui sampai dimana dan sejauh mana keberhasilan efektifitas dari peranan evaluasi terhadap keberhasilan suatu program apakah sesuai dengan perencanaan apa belum.

Dengan adanya evaluasi kesekolah mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan dapat juga memberikan motivasi untuk kearah lebih baik terutama memberikan pembinaan jika ditemukan kesalahan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tujuan dilakukan evaluasi untuk menjaga dan mendorong agar (a) pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat; (b) pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan; (c) kesulitan dan kelemahan dalam pembuatan laporan bias diatasi dengan ditemukannya kesalahan waktu pelaksanaan evaluasi (d) pelaksanaan tugas berjalan efektif dan tepat waktu.

Evaluasi yang dilakukan sifatnya untuk melihat apakah dana tersebut sudah tepat dalam penggunaannya dan administrasi keuangannya sudah tertib atau belum dan apakah sudah sesuai aturan yang berlaku. Ciri-ciri evaluasi yang baik yaitu : a) Menemukan fakta pelaksanaan tugas; b) Mencaga penyimpangan dan penyelewengan rencana; c) Meningkatkan efisiensi; d) Menemukan kesalahan; e) Membimbing pelaksanaan menjalankan tugas.

Berdasarkan temun penelitian menunjukkan bahwa evaluasi implementasi penggunaan dana BOS di SMA Negeri 4 Seluma dilakukan secara internal dan dilakukan secara eksternal, efektivitas pelaksanaan BOS disekolah erpendekatan pada perspektif manfaat dan

partisipatif. Peranan Sumber Daya Manusia dalam memperoleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) apakah mencapai keinginan atau belum.

Analisis dari pengelompokan pemanfaatan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi indikator utama melihat fungsi kontrol peranan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola anggaran. Pada dimensi manfaat dapat disimpulkan bahwa peranan BOS sangat efektif membantu keuangan sekolah. Adanya evaluasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada dua tahun ajaran semenjak dimulainya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA menciptakan suatu tekad yang bagus dari pihak terkait beserta para wali murid mengenai perbaikan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Transparansi yang semakin jelas kepada wali murid mengenai pelaksanaan proses pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah, pemahaman fungsi peranan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sesungguhnya kepada wali murid bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ialah subsidi umum dan bukan saja sebagai subsidi khusus bagi siswa melainkan memfasilitasi dan mengcover biaya-biaya kegiatan belajar mengajar disekolah. Secara keseluruhan termasuk siswa miskin. Sedangkan pada dimensi partisipatif diberlakukannya evaluasi pada pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) lebih memperbaiki sisi fungsi kontrol atau peranan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disekolah tersebut telah berjalan sesuai prosedur juklak dan juknis yang dijadikan pedoman.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perencanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diawali dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) di SMA Negeri 4 Seluma disusun oleh kepala sekolah dengan melibatkan wakil kepala sekolah, bendahara, dewan guru, ketua dan pengurus komite. Pelaksanaan perencanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang terdapat dalam buku panduan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Semenjak diberik

Operasional Sekolah (BOS), sekolah dianjurkan untuk tidak memungut iuran dari siswa ataupun wali murid tapi kenyataannya sekolah masih memungut iuran dari siswa atau wali murid tetapi melalui persetujuan komite sekolah. Evaluasi dilaksanakan dengan waktu yang tidak ditentukan, membuat sekolah siap setiap saat terutama dalam pembuatan laporan yang harus sesuai dengan juklak dan juknisnya, intinya administrasi mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus lengkap dan jelas sesuai dengan buku panduan yang ada. Sehingga kapanpun pelaksanaan evaluasi, sekolah sudah siap. Evaluasi juga dilakukan oleh inspektorat jenderal/BPK/Bawasda.

Saran

1. Kepada pihak terkait untuk dapat memantau dan mengevaluasi pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) benar-benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar sesuai dengan buku pedoman Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditetapkan pemerintah.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma diharapkan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan pendidikan terutama dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara intensif dan kontinyu untuk mengetahui ketepatan penggunaan anggaran dan akuntabilitasnya.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma atau pihak terkait diharapkan dapat memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dana BOS, agar dana BOS yang dipergunakan sekolah memberikan dampak terhadap pengembangan mutu sekolah. Mutu yang dimaksud disini adalah mutu pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan yang terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Djudju, Sudjana. 2006. *Evaluasi Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fattah, Nanang. 2004. *Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Griffin, Patrick dan Nix, Peter. 1991. *Educational Assessment Reporting*. Sydney: Harcourt Brace Jovanovich.
- Hikmat, Harry. 2004. *Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Sosial*. Jakarta: Bappenas
- Muhajir. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Mulyatiningsih, Endang. 2011. *Evaluasi Proses Suatu Program*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nawawi, Hadari. 2006. *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siagian, S.P. 1983. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Soemardi. 1992. *Pengantar Administrasi Pemerintahan*. Bandung: STKS
- Tilaar, H.A.R dan Nugroho, R. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuanda, M. 2009. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka.